

ABSTRAK

Tingginya angka perokok remaja di Indonesia menjadi perhatian serius, terutama akibat kemudahan akses terhadap produk rokok yang dijual bebas, termasuk di sekitar lembaga pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan, khususnya Pasal 434 ayat (1) huruf e, melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan. Namun di Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, masih ditemukan banyak warung yang menjual rokok sangat dekat dengan sekolah, bahkan tanpa pengetahuan mengenai regulasi tersebut. Masalah ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta pelaksanaan peraturan yang ada. Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan terhadap pengaturan jarak warung penjual rokok dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap penjual rokok di dekat lembaga pendidikan di Desa Catak Gayam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap pengaturan jarak penjualan rokok di dekat lembaga pendidikan di Desa Catak Gayam, serta mengevaluasi peran dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menegakkan regulasi tersebut. Metode ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 di lapangan masih belum ada. Sebagian besar penjual tidak mengetahui adanya aturan pelarangan, dan pemerintah daerah, meskipun menyadari adanya pelanggaran, belum mengambil tindakan konkret karena belum adanya peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Satpol PP juga belum menjalankan peran pengawasan sebagaimana mestinya. Kondisi ini memperkuat pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aturan pusat melalui pembentukan Perda dan sosialisasi yang lebih menyeluruh.

Kata Kunci : Pengawasan, Jarak, Inkonsistensi

ABSTRACT

The high number of teenage smokers in Indonesia is a serious concern, especially due to the easy access to cigarette products sold freely, including around educational institutions. Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of the Health Law, specifically Article 434 paragraph (1) letter e, prohibits the sale of cigarettes within a 200-meter radius of educational units. However, in Catak Gayam Village, Mojowarno District, Jombang Regency, many stalls are still found selling cigarettes very close to schools, even without knowledge of the regulation. This problem indicates weak supervision and implementation of existing regulations. This study examines the implementation of Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of the Health Law regarding the regulation of the distance of cigarette stalls and the Jombang Regency Government's supervision of cigarette sellers near educational institutions in Catak Gayam Village. This study aims to determine the implementation of Government Regulation Number 28 of 2024 regarding the regulation of the distance of cigarette sales near educational institutions in Catak Gayam Village, as well as to evaluate the role and supervision of the Jombang Regency Government in enforcing the regulation. The type of research used is empirical juridical with a sociological legal approach through interviews, observations, and documentation studies at the research location. The main focus of the research is on the local government's response to violations by cigarette sellers in educational institutions. The results show that the implementation of Government Regulation Number 28 of 2024 in the field is still lacking. Most sellers are unaware of the prohibition, and local governments, despite being aware of violations, have not taken concrete action due to the lack of a regional regulation (Perda) as the legal basis for its implementation. Relevant agencies such as the Health Office, the Education Office, and the Public Order Agency (Satpol PP) have also not carried out their supervisory role as intended. This situation reinforces the importance of an active role for local governments in following up on central regulations through the formation of Perda and more comprehensive socialization.

Keywords: *Supervision, Distance, Inconsistency*